

NASIONALISME KLASIK DI BUMI NUSANTARA

Oleh Nurcholish Madjid

Kesuksesan Indonesia sebagai “bangsa”, dalam pengertian keberhasilannya muncul di antara bangsa-bangsa di dunia, tidak dapat dipandang sebagai hal biasa. Kesuksesan itu didahului dengan perjuangan panjang mendaki bukit terjal penuh ancaman bahaya sehingga banyak menuntut pengorbanan.

Pada mulanya terdapat berbagai suku bangsa mendiami kawasan Asia Tenggara, dalam lingkungan ribuan pulau, besar dan kecil. Hubungan antarpulau tidak selalu mudah, sehingga masing-masing pulau sedikit-banyak terisolasi satu dari yang lain, suatu kenyataan yang mendorong tumbuhnya ciri-ciri kesukuan, kebahasaan, dan kebudayaan yang terpisah-pisah. Bahkan dalam lingkungan pulau-pulau besar pun, pola kesukuan dan kebudayaan yang berbeda-beda terdorong muncul dengan sifat khas masing-masing menurut lingkungannya, dikarenakan keadaan geografis dan topografinya yang menyebabkan terbentuknya wilayah-wilayah yang terpisah satu dari lainnya.

Keanekaragaman budaya itu dari satu sisi adalah kekayaan, tetapi dari sisi lain adalah kerawanan. Sebagai kekayaan, keanekaragaman budaya dapat dibandingkan dengan keanekaragaman nabati. Keanekaragaman itu dapat menjadi sumber pengembangan budaya hibrida yang kaya dan tangguh, melalui penyuburan silang budaya (*cultural cross fertilization*). Berbagai bentuk penyuburan silang budaya telah terjadi, tetapi umumnya merupakan hal-hal

“kebetulan”, sebagai akibat sampingan interaksi perdagangan regional yang ditunjang oleh kekuasaan politik. Peranan kekuasaan-kekuasaan besar seperti Sriwijaya, Majapahit, dan Aceh penting sekali dalam proses penyuburan silang budaya Asia Tenggara. Pengaruh penyuburan silang itu dapat dikenali pada adanya unsur-unsur kosmopolit dan universal dalam banyak segi budaya umum kawasan Asia Tenggara.

Sebagai kerawanan, keanekaragaman budaya melemahkan kohesi antarsuku dan pulau. Karena itu Asia Tenggara selamanya rentan terhadap penaklukan dan penjajahan dari luar. Usaha penguatan kohesi beberapa bagian atau seluruh Nusantara melalui penyatuan dalam kekuasaan politik tunggal pernah beberapa kali terjadi, seperti oleh kerajaan-kerajaan Sriwijaya, Majapahit, dan Aceh, misalnya. Tetapi usaha-usaha itu menghasilkan suatu penyatuan wilayah yang tidak persis sama dengan wilayah Indonesia modern sekarang ini. Di satu sisi hasil penyatuan itu lebih kecil daripada Indonesia sekarang, karena tidak mencakup seluruh wilayah dari Sabang sampai Merauke. Di sisi lain, hasil penyatuan itu lebih besar daripada wilayah Indonesia sekarang ini, karena mencakup pula wilayah-wilayah di luar lingkungan Sabang-Merauke, seperti di Semenanjung Melayu, Kalimantan Utara, Mindanao, bahkan sampai Formosa dan Madagaskar.

Penyatuan wilayah Asia Tenggara yang kini dikenal sebagai “Indonesia” adalah kelanjutan dari wilayah kekuasaan penjajahan Belanda. Wilayah itu dikenal sebagai “Hindia Belanda” atau “Hindia Timur Belanda” (*Dutch East Indies*). Tetapi “Indonesia” sebagai bangsa tidaklah dibentuk oleh Belanda atau pemerintah penjajah, melainkan justru oleh semangat perlawanan terhadap penjajahan itu. Inilah bagian dari hakikat kebangsaan kita yang agaknya perlu dipahami secara lebih baik, lebih jujur, dan lebih seimbang.

Ada beberapa hal amat penting yang harus ditelaah ulang mengenai proses penjajahan Asia Tenggara oleh bangsa-bangsa Eropa. Sudah sejak berabad-abad sebelumnya, kawasan Asia

Tenggara menjadi sumber pengadaan komoditi dagang yang amat diperlukan masyarakat dunia. Rempah-rempah termasuk yang paling dikenal sebagai produk amat penting saat itu, di samping bahan-bahan wewangian seperti cendana dan gaharu, juga getah “kapur” dari Aceh, khususnya dari Barus (“kapur Barus”). Disebabkan oleh daya tarik produk-produk eksotik itu, kawasan Asia Tenggara sudah dikenal sejak lama oleh para saudagar dari Anak-Benua India dan Timur Tengah. Dari kawasan Anak-Benua datang para saudagar yang membawa agama-agama India, yaitu Hindu dan Budha. Pengaruh kekuasaan politik yang mereka tanamkan mendorong berkembangnya budaya bercorak India, dengan peran utama bahasa Sanskerta. Ciri budaya keindiaan kawasan ini merupakan alasan untuk mengenalinya sebagai kawasan India, sehingga dalam khazanah antropologi disebut “Indonesia”, yakni “Kepulauan India”, sebanding dengan daratan tenggara Asia yang disebut “Indocina”, yakni “Cina India”.

Dengan perangkat budaya Sanskerta, untuk jangka waktu lama Asia Tenggara merupakan wilayah budaya besar yang berhubungan satu dengan lainnya, untuk kemudian bersambungan dengan budaya Anak-Benua. Pola budaya ini lebih memperkuat kecenderungan yang sudah ada, yaitu penyatuan sebagian besar wilayah Asia Tenggara ke dalam kawasan perdagangan regional yang berpusat di Anak-Benua (Subkontinen) India.

Budaya *Hemispheric* Islam

Pada saat puncak-puncak perkembangan peradaban Islam, kawasan Asia Tenggara menyatu dalam pola budaya umum yang meliputi hampir seluruh belahan bumi timur sejak dari wilayah-wilayah Afrika dan Eropa pada tepi Lautan Atlantik sampai ke wilayah Zaitun (sekarang Guangzhou) di daratan Cina pada tepi Lautan Teduh. Dengan begitu terbentuk pola dasar sebuah budaya umum berdimensi *hemispheric*, artinya, meliputi seluruh belahan bumi

(yakni, belahan bumi “timur”, karena daratan Amerika sebagai belahan bumi “barat” belum “ditemukan”), suatu dimensi yang saat itu setara dengan dimensi “global” sekarang ini. Pola budaya *hemispheric* itu menghasilkan terbentuknya lingkungan yang memberi kemudahan bagi penyebaran dan peneguhan agama Islam di kawasan Asia Tenggara. Peranan penting para pedagang dari Anak Benua tetap berlanjut dan dominan, namun kali ini mereka kebanyakan tidak lagi beragama Budha atau Hindu, melainkan Islam. Mereka menganut pola budaya Perso-Arab, yang kemudian sedikit-banyak menggeser pola budaya Sanskerta. Dalam perkembangan lebih lanjut pola budaya Perso-Arab digantikan oleh pola budaya yang bercorak kearaban dengan dominasi bahasa Arab, tanpa banyak unsur bahasa Persi. Pinjaman kata-kata Arab dalam bahasa-bahasa Asia Tenggara tidak lagi lewat bahasa Persi, tetapi langsung dari bahasa Arab.

Pada saat-saat awal Asia Tenggara tergabung dalam pola budaya *hemispheric* itu, pusat-pusat kekuasaan masih terbagi antara yang Islam seperti kesultanan Aceh dan yang Hindu seperti Kerajaan Majapahit. Tetapi pada waktu bersamaan pusat-pusat kegiatan perdagangan di berbagai kota (Persi: *bandar*) di tepi pantai atau sungai besar boleh dikata semuanya berada di tangan para saudagar Muslim. Dari kalangan mereka, banyak saudagar besar yang sekaligus bertindak sebagai penguasa (“wali”) pemerintahan bandar-bandar itu. Suasana otonom pemerintahan kota pantai itu diperkuat dengan berdirinya gilda-gilda perdagangan berbentuk lingkungan bangunan dengan tempat-tempat penginapan para saudagar dari luar wilayah. (Tempat penginapan itu disebut “pondok”, dari perkataan Arab “*fundûq*” yang berasal dari perkataan Yunani “*pandokheyon*” atau “*pandokeyon*” yang berarti penginapan — dalam terminologi Arab modern, “*fundûq*” berarti hotel).

Para saudagar itu, dengan kearifan kosmopolitan mereka, juga berperan sebagai tempat meminta nasehat bagi masyarakat luas, gilda-gilda dagang mereka menjadi tujuan para penuntut kearifan, dan pondok-pondok mereka menjadi tempat menginap para

penuntut yang datang dari jauh. Berangsur-angsur “pondok” yang semula merupakan penginapan para saudagar berkembang menjadi “pondok” penginapan para penuntut ilmu dan kearifan, sama dengan gejala yang umum didapatkan di seluruh dunia Islam saat itu, dengan nama-nama yang berbeda seperti *zâwiyah*, *ribâth*, *khâniqah*, dan *tekke*. Semua itu sekaligus merupakan tempat pertemuan kaum sufi, yang dalam banyak hal mereka itu juga kaum pedagang. Konsep “pondok” kemudian terpadukan dengan konsep “padepokan”, dan terbentuklah “pondok” sebagai institusi pendidikan dan kajian yang khas Indonesia seperti kita saksikan sekarang.

Para pencari kearifan itu, sebagai kelaziman mereka yang menuntut ilmu, adalah orang-orang yang mengembangkan kecakapan tulis-baca, karena itu disebut kaum *shastri*. Oleh karena kedudukan mereka sebagai murid seorang guru arif-bijaksana yang disebut *kiyahi*, mereka disebut juga kaum *cantrik*, orang yang berguru atau magang. Konon, salah satu dari dua pengertian itu menjadi asal sebutan “santri”, dan tempat mereka belajar atau berkumpul disebut secara lengkap “pondok pesantren”, yaitu penginapan dan tempat kaum santri berguru kepada seorang *kiyahi*.

Ketika kawasan Asia Tenggara mulai bersentuhan dengan peradaban Islam, daratan Cina sudah sejak berabad-abad sebelumnya dikenal kaum Muslimin Arab dan Persia. Sejarah peradaban Cina-Arab telah berlangsung sejak lebih dari 1.000 tahun sebelum Islam. Terdapat petunjuk bahwa daratan Cina telah pula diperkenalkan kepada Islam sejak masa hidup Nabi Muhammad *saw*. *Encyclopaedia of Islam* (Leiden, 1999) menyebutkan adanya kawasan hunian kaum Muslimin Arab dan Persi di kawasan timur daratan Cina, dengan jumlah mereka yang mencapai angka ratusan ribu orang. Mereka mendirikan dan hidup di kota Zaitun, kini Guangzhou. Dilaporkan oleh Ibn Batutah, seorang pengembara dunia dari Afrika Utara, bahwa Zaitun memiliki pelabuhan amat besar, tempat berlabuh ratusan kapal jung (*junk*) besar dan kapal jung kecil yang tidak terhitung banyaknya. Kaum Muslim hidup bebas dengan pranata-pranata keagamaan Islam seperti kantor *qâdli* (pengadilan), *Syaykh*

al-Islâm (“Sesepuh Islam”, setingkat dengan Mufti). Daerah itu juga merupakan kawasan kaum Sufi dan para saudagar.

Islam di Cina memiliki sejarah yang sangat panjang, yaitu sepanjang sejarah Islam itu sendiri. Di kota Guangzhou terdapat makam Sa’ad ibn Abi Waqqas, seorang sahabat Nabi yang datang dan wafat di kota Islam itu, dan yang mendirikan sebuah masjid, yaitu masjid Huai Sheng. Sa’ad ibn Abi Waqqas dimakamkan di bawah sebuah bangunan berkubah yang telah berumur lebih dari 1300 tahun.

Di Guangzhou juga ada sebuah masjid, didirikan pada tahun 1465, di zaman Dinasti Ming, yaitu masjid Hao Pan. Mengikuti tradisi dunia Islam pada zaman-zaman kejayaannya, di masjid Hao Pan pernah berdiri sebuah universitas. Revolusi budaya RRC telah mengubah masjid ini menjadi pabrik, dan setelah dikembalikan sebagai masjid dilengkapi dengan sebuah pusat pengajaran bahasa Arab.

Diduga dari kawasan Zaitun atau Guangzhou itulah bertolak secara bergelombang imigran Cina Muslim ke Jawa. Dari kota Nanjing (Nanking) pada sungai Yang Tse yang tidak jauh dari Guangzhou bertolak ekspedisi armada kelautan Cina pimpinan Ma San Pao, lebih dikenal dengan nama Cheng Ho, seorang admiral Muslim, yang karena jabatannya juga dikenal sebagai San Pao Kong. Ia meninggalkan sebuah bangunan masjid atas namanya, San Pao Kong, di Semarang (kini digunakan sebagai klenteng). Mereka datang sambil menyiarkan agama Islam di Jawa, dengan sisa-sisa bekas hunian mereka sepanjang sungai-sungai Brantas dan Solo. Dengan begitu mereka ikut memperkuat gilda-gilda perdagangan kaum Muslim yang telah ada di bandar-bandar, dan memiliki peran dalam mengembangkan pranata pondok pesantren.

Permulaan Imperialisme Eropa

Dalam suasana Asia Tenggara sebagai kawasan peradaban dan perdagangan *hemispheric* Islam itulah datang bangsa-bangsa Eropa.

Mereka didahului oleh Spanyol dan Portugis dari semenanjung Iberia di Eropa Barat Daya. Semenanjung itu secara keseluruhan oleh orang Arab disebut Andalusia. Selama lima sampai tujuh abad kaum Muslim memerintah Andalusia dan pembangunannya menjadi pusat peradaban dunia, khususnya untuk wilayah barat (*al-Maghrib*). Karena berbagai sebab, terutama percekocokan antara mereka sendiri, kaum Muslim akhirnya terkalahkan oleh gerakan *reconquista* (penaklukan kembali) orang-orang Iberia, dan berakhirilah zaman gemilang Andalusia. Bangsa-bangsa Spanyol dan Portugis yang baru selesai dengan *reconquista* itu kemudian mengembara ke seluruh muka bumi. Tujuan mereka ialah menemukan jalan sendiri langsung ke India dan Timur Jauh (khususnya Cina dan Maluku), tanpa tergantung kepada para pedagang Muslim Arab, Persia, India, dan Cina. Dalam pengembaraan itu, seperti kita ketahui bersama, mereka “menemukan” Amerika dan menaklukkan banyak bangsa lain, termasuk beberapa bangsa di Asia Tenggara.

Dalam pandangan kaum Muslim (dan Yahudi) Iberia, istilah *reconquista* tidak tepat, sebab masuknya Islam pada tahun 711 ke semenanjung itu tidak bertujuan penaklukan (Arab: *qahr*) melainkan pembebasan (Arab: *fath*), yaitu pembebasan penduduk dari pemaksaan agama oleh penguasa, yang dimulai oleh Raja Recared pada abad sebelumnya. Tetapi dalam pandangan mereka yang sejiwa dengan Raja Recared, *reconquista* itu benar, karena memang bertujuan menaklukkan kembali penduduk Iberia dan memaksakan agama raja penguasa kepada mereka, dengan ancaman menerima atau mati dibunuh. Praktik inkuisisi (*inquisition*) atau pemeriksaan paham keagamaan pribadi, menurut hukum *inquisitio haereticae pravitatis* ciptaan Paus Gregorius IX yang terkenal menjadi sumber kekejaman mengerikan itu berkembang dengan semangat *reconquista* Spanyol. Semangat itu kemudian dibawa dan disebarkan oleh bangsa-bangsa Spanyol dan Portugis ke mana pun mereka mengembara. Kaum *reconquistadores* (penakluk) dari Iberia itu di mana pun juga memandang kaum Muslim yang mereka jumpai sebagai musuh yang harus diperlakukan dengan

semangat *reconquista*. Rasa permusuhan sengit itu melatarbelakangi penggunaan sebutan “Moro” (*Moors*) yang tidak relevan untuk kaum Muslim Mindanao, sebutan yang mereka gunakan untuk kaum Muslim Iberia yang dengan gemas mereka binasakan.

Untuk dapat benar-benar menangkap semangat perlawanan masyarakat Asia Tenggara terhadap orang-orang Barat yang mulai berdatangan itu, suasana sengit dan bermusuhan kaum *reconquistadores* Spanyol dan Portugis tersebut harus dimengerti. Keserakahan orang-orang Spanyol dan Portugis yang merampok harta kekayaan bangsa-bangsa asli (“Indian”) Amerika Selatan juga terjadi terhadap bangsa-bangsa Asia Tenggara. Mereka hanya terhambat oleh perlawanan sengit dari masyarakat yang sudah berpengalaman dalam pergaulan internasional kosmopolit dalam lingkungan peradaban *hemispheric* Islam yang sudah mapan.

Tetapi memang pada masa-masa itu peradaban Islam sudah mulai melemah, dan perlahan-lahan dunia Islam kembali menjadi sekumpulan bangsa-bangsa terkebelakang. Maka akhirnya Malaka, pusat perdagangan dan peradaban Islam Asia Tenggara, pada tahun 1511 jatuh ke tangan Portugis. Peristiwa itu terjadi 400 tahun setelah wafat Imam al-Ghazali, atau 800 tahun setelah Thariq ibn Ziyad membebaskan Iberia dan Muhammad ibn Qasim membebaskan lembah sungai Indus. Karena itu, kejatuhan Malaka merupakan peristiwa yang amat simbolik bagi perubahan drastis sejarah umat manusia. Yaitu, titik permulaan kekalahan seluruh dunia Islam dan kemenangan bangsa-bangsa Eropa, khususnya Eropa Barat (Eropa Timur, terutama Balkan, saat itu masih dikuasai oleh Kerajaan Islam Turki Usmani sampai sekitar 500 tahun kemudian, yaitu awal abad ke-20, setelah terjadi Balkanisasi atau pemecahbelahan Balkan menjadi negara-negara kecil yang saling bermusuhan).

Suatu ironi besar bagi dunia Islam, bahwa bangsa-bangsa Eropa Barat itu akhirnya mampu mengungguli bangsa-bangsa Muslim setelah mereka berusaha selama lima-enam abad, karena mereka mengadopsi ilmu pengetahuan Islam. Bahkan pandangan hidup Islam yang membuka alam semesta sebagai objek observasi

dengan sikap yang bebas dari kecenderungan penyucian (sakralisasi) yang mitologisasi, juga mereka ambil dengan penuh minat (lihat contoh penuturannya dalam novel sejarah, *The Name of the Rose* oleh Umberto Eco, misalnya). Demikian pula konsep-konsep Islam tentang manusia yang bersemangat egalitarianisme, partisipasi dan keterbukaan atas dasar kebebasan manusia untuk memilih sendiri apakah mau menjadi makhluk setinggi-tingginya atau serendah-rendahnya-seperti dijadikan dasar filsafat kemanusiaan *Renaissance* oleh Pico della Mirandola-juga mereka peluk seerat-eratnya. Semua itu terasa amat ironis bagi kaum Muslim karena pada saat-saat itu mereka justru mulai banyak menganut pandangan dunia penuh takhayul, banyak serba-menyucikan alam, dengan pandangan kemanusiaan feodalistik dalam pola pemerintahan despotik, otokratik, dan totaliter. Despotisme itu tercermin dalam sebutan para penguasa Islam sebagai *Khalîfat-u 'l-Lâh fi 'l-Ardl* (Khalifah Allah di Bumi)-padahal semestinya adalah tidak lebih daripada Khalifah Rasul (*Khalîfat-u 'l Rasûl*) dalam urusan duniawi. Bahkan ada yang mulai menyebut diri mereka *Zhill-u 'l-Lâh fi 'l-Ardl* (Bayangan Tuhan di Bumi) serta gelar-gelar serupa yang bersemangat kekuasaan mutlak *heraldic*, bersifat penampilan pengagungan diri, dan *megalomaniac*, penuh fantasi kekuasaan. Memang benar bahwa Nabi *cum* Raja Dawud *as* adalah Khalifah Allah di bumi, tetapi perlu diingat bahwa yang mengangkatnya adalah Allah sendiri, dengan perintah agar Dawud *as* menjalankan pemerintahan antara manusia dengan adil. Demikian pula, terdapat isyarat dalam sebuah hadis bahwa sultan adalah bayangan Allah di bumi, tetapi dalam pengertian bahwa ia menjadi tempat kaum lemah mencari perlindungan, dan bahwa ia selamanya bersandar kepada Allah sebagai sumber cahaya, sebagai hamba Allah, makhluk yang senantiasa memerlukan pertolongan-Nya, dan tidak akan pernah sekejap mata pun mampu berbuat tanpa taufik dan hidayah Allah (*Divine providence*). Jadi kedudukan penguasa atau sultan sebagai “bayangan Tuhan di bumi” tidaklah sama, bahkan bertentangan dengan konsep “dewa-raja” (*devaraj*) yang merupakan

salah satu sumber despotisme seperti kebanyakan terlihat dalam kenyataan. Pengertian sultan sebagai “bayangan Tuhan di bumi” justru menegaskan tanggung jawab pribadi seorang penguasa kepada Tuhan untuk menjalankan pemerintahan yang benar, adil, terbuka, dan memandang semua orang sama dalam martabat, hak, dan kewajiban. Telah dikemukakan bahwa despotisme adalah penyimpangan fatal dari konsep *madīnah*. Contoh despotisme ialah pemerintahan Shah Muhammad Reza Pahlevi dari Iran yang telah tumbang, yang memandang dirinya sebagai keturunan Nabi Muhammad *saw* dan Raja Darius sekaligus, dan yang memahkotai dirinya di Persepolis, ibukota Persia kuna, dengan gelar *Shâhinshâh Aryamehr* (Raja-diraja, Cahaya Arya), suatu bentuk penyimpangan yang sempurna dari wawasan *madīnah*.

Perjuangan Melawan Kaum Imperialis

Dari gambaran sekilas tentang intrusi dan ekspansi kekuasaan bangsa-bangsa Eropa Barat di atas dapat dimengerti bahwa yang paling sengit melakukan perlawanan kepada orang-orang Eropa ialah para penguasa dunia perdagangan Nusantara yang berpangkal terutama di bandar-bandar atau kota-kota pantai. Dalam bidang sosial-politik mereka dipimpin para sultan, dan dalam bidang sosial-keagamaan mereka dipimpin para ulama. Karena itu, pada umumnya pahlawan nasional kita dari masa-masa tersebut adalah para sultan dan ulama, di samping adanya pahlawan-pahlawan dari latar belakang sosial-budaya dan keagamaan yang lain. Kesengitan terhadap kaum penjajah dari Eropa itu mendorong para pemimpin rakyat untuk melakukan politik boikot dan menerapkan kebijakan non-koperasi total di semua bidang kehidupan, khususnya di bidang sosial-budaya dan pendidikan. Sekalipun para penjajah itu terdiri dari bangsa-bangsa Eropa yang berlainan dan silih-berganti, namun semangat perlawanan masyarakat-masyarakat Asia Tenggara tetap teguh, khususnya dalam politik non-koperasi totalnya. Hal

ini terutama benar berkenaan dengan para ulama, yang secara genealogis atau ideologis merupakan pewaris langsung para penguasa bandar-bandar dengan masyarakat perdagangannya.

Kekerasan kebijakan perlawanan budaya itu membuahkan akibat bagaikan pisau bermata dua: di satu pihak berhasil memelihara tingkat tinggi kepahlawanan bangsa yang tidak kenal menyerah, di lain pihak meminggirkan mereka dari arus utama interaksi sosial-budaya dan pendidikan yang semakin diungguli oleh pola-pola interaksi modern. Mereka menjadi masyarakat yang teringkari dari kemungkinan memperoleh berbagai faedah besar dari partisipasi dan pelibatan diri dalam interaksi modern itu. Marginalisasi dan deprivasi ulama dan masyarakat pondok pesantren dalam bidang pendidikan merupakan salah satu sumber utama kesulitan sosial-politik kelompok pewaris semangat para wali bandar-bandar itu, justru setelah kemerdekaan bangsa yang mereka dambakan tercapai. Dalam perkembangan lebih lanjut, kesulitan mereka juga menjadi kesulitan seluruh bangsa dan negara. Karena itu, dengan sedikit membuat loncatan kepada kesimpulan, persoalan bangsa dan negara tidak akan selesai jika persoalan masyarakat lingkungan pondok pesantren tidak terselesaikan. Mengingkari mereka akan berarti mengingkari kenyataan amat asasi tentang masyarakat Indonesia. Mereka adalah “*the corner stone of the house neglected by the builders*”, “batu sudut rumah (negara) yang diabaikan oleh para pembangun rumah itu”. [❖]